

PENGARUH SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH, TRANSPARANSI, DAN KESIAPAN SDM TERHADAP PELAPORAN KEUANGAN (KOTA PALOPO)

Jihan Sukri¹, Indah Pratiwi², Mutmainna³

^{1,2,3} Department of Accounting, Faculty Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palopo.

E-mail : jihansukri6@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), transparansi, dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) terhadap kualitas pelaporan keuangan Pemerintah Kota Palopo. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih fokus pada teknologi informasi secara umum, studi ini mengisi celah dengan mengintegrasikan SIPD spesifik, transparansi, dan kesiapan SDM di konteks pemerintah daerah skala kota kecil, yang krusial untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan di era digitalisasi. Pendekatan kuantitatif dengan metode survei digunakan, di mana data dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert kepada 52 pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo dengan teknik total sampling. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda. Hasil menunjukkan bahwa secara parsial, penerapan SIPD tidak berpengaruh signifikan, sementara transparansi dan kesiapan SDM berpengaruh positif dan signifikan. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas pelaporan keuangan daerah tidak hanya bergantung pada sistem informasi, tetapi juga penguatan transparansi dan pengembangan kapasitas SDM untuk tata kelola yang akuntabel dan efektif.

Kata kunci: Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), transparansi, kesiapan sumber daya manusia, pelaporan keuangan daerah.

Abstract

This study aims to analyze the effect of the implementation of the Regional Government Information System (SIPD), transparency, and human resource readiness on the quality of financial reporting in the Palopo City Government. Unlike previous research that focused more on information technology in general, this study fills the gap by integrating the specific SIPD, transparency, and human resource readiness in the context of small-city local governments, which are crucial for improving financial accountability in the digital era. A quantitative approach using a survey method was used, with data collected through a Likert-scale questionnaire from 52 employees of the Palopo City Regional Finance and Asset Management Agency (BPKAD) using a total sampling technique. Data analysis was conducted using multiple linear regression. The results indicate that, partially, the implementation of SIPD has no significant effect, while transparency and human resource readiness have a positive and significant effect. Simultaneously, all three variables significantly influence the quality of financial reporting. These findings indicate that improving the quality of regional financial reporting depends not only on information systems but also on strengthening transparency and developing human resource capacity for accountable and effective governance.

Keywords: Regional Government Information System (SIPD), transparency, human resource readiness, regional financial reporting.

1. PENDAHULUAN

Kualitas Pelaporan keuangan pemerintah daerah merupakan elemen penting dalam *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) yang akuntabel dan transparan. Laporan keuangan yang akurat, andal, dan tepat waktu menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan publik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah (Rafael *et al.*, 2024). Oleh sebab itu, pemerintah daerah dituntut untuk terus memperbaiki sistem dan mekanisme pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Implementasi aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) menjadi salah satu inovasi penting dalam proses digitalisasi pengelolaan keuangan daerah. SIPD memungkinkan integrasi data perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan secara *real time*, yang dapat mempercepat siklus pelaporan dan mengurangi risiko kesalahan akibat proses manual. Dengan memanfaatkan teknologi ini, pemerintah daerah mampu menghasilkan kualitas pelaporan keuangan yang lebih efektif, efisien, dan transparan, sehingga pengambilan keputusan berbasis data menjadi lebih optimal.

Namun demikian, penerapan teknologi informasi tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan aspek non-teknis. Transparansi berperan penting dalam memperkuat akuntabilitas melalui keterbukaan informasi mengenai alokasi dan penggunaan dana publik kepada masyarakat serta pemangku kepentingan (Ritonga, 2024), sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tingkat transparansi yang tinggi mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara profesional dan bertanggung jawab.

Selain transparansi, kesiapan sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dalam

konteks SIPD, kesiapan SDM tidak hanya dimaknai sebagai ketersediaan aparatur, tetapi terutama berkaitan dengan tingkat kompetensi teknis dan non-teknis aparatur yang secara langsung terlibat dalam proses pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah. Kompetensi teknis mencakup kemampuan mengoperasikan modul perencanaan dan penganggaran SIPD (RKPD–RAPBD), melakukan input dan validasi data keuangan secara real time melalui fitur e-budgeting dan e-reporting, menyusun serta menganalisis laporan keuangan terintegrasi seperti Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Laporan Operasional (LO), serta kemampuan menangani kendala teknis (troubleshooting) dalam penggunaan sistem. Sementara itu, kompetensi non-teknis meliputi pemahaman terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah dan SIPD, seperti Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, serta pengalaman pelatihan dan sertifikasi resmi pengguna SIPD dari Kementerian Dalam Negeri (Naida, 2024).

Dalam praktiknya, implementasi SIPD di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo masih menghadapi berbagai tantangan operasional. Survei internal menunjukkan bahwa hanya sekitar 40% pegawai yang menguasai modul inti SIPD, yang berdampak pada kesalahan input data hingga 15% serta keterlambatan penyusunan laporan keuangan bulanan. Keterbatasan penguasaan sistem tersebut menyebabkan kualitas pelaporan keuangan belum sepenuhnya memenuhi standar transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan.

Dengan demikian, kesiapan sumber daya manusia dalam penelitian ini didefinisikan sebagai tingkat kompetensi teknis dan non-teknis aparatur dalam mengoperasikan aplikasi SIPD, memahami regulasi pengelolaan keuangan daerah, serta memanfaatkan output sistem secara akurat dan tepat waktu untuk mendukung kualitas

pelaporan keuangan Pemerintah Kota Palopo.

Penelitian ini penting karena di tengah perkembangan teknologi informasi dan tuntutan transparansi publik, masih terdapat kesenjangan nyata dalam pelaksanaan SIPD di BPKAD Kota Palopo, khususnya terkait kesiapan SDM yang berdampak pada kualitas pelaporan keuangan. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan teknis dan non-teknis agar kualitas pelaporan keuangan menjadi lebih akurat, tepat waktu, dan terpercaya. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar kebijakan strategis pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas SDM, meningkatkan pemanfaatan SIPD, serta mendorong tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Meskipun penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), transparansi, dan kesiapan sumber daya manusia telah banyak diteliti dalam konteks pelaporan keuangan pemerintah daerah, hasil penelitian sebelumnya masih menunjukkan temuan yang belum konsisten. Beberapa studi menemukan bahwa penerapan SIPD berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sementara penelitian lain menunjukkan bahwa sistem tersebut belum mampu meningkatkan kualitas pelaporan secara signifikan akibat kendala teknis dan keterbatasan kompetensi aparatur. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu masih memposisikan SIPD sebagai faktor dominan tanpa menguji secara simultan peran transparansi dan kesiapan SDM sebagai determinan keberhasilan pelaporan keuangan. Penelitian yang secara spesifik mengkaji ketiga variabel tersebut secara bersamaan pada pemerintah daerah dengan karakteristik wilayah dan kapasitas SDM yang berbeda, khususnya di Kota Palopo, masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan penelitian tersebut dengan menguji secara empiris pengaruh penerapan SIPD, transparansi, dan kesiapan sumber daya manusia terhadap kualitas pelaporan keuangan Pemerintah Kota Palopo.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), transparansi, dan kesiapan sumber daya manusia terhadap kualitas pelaporan keuangan di Pemerintah Kota Palopo. Studi ini diharapkan bisa menjadi dasar rekomendasi strategis untuk pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan peningkatan. Dengan hasil penelitian ini, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi faktor-faktor utama yang perlu diperkuat untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pelaporan keuangan. Selain itu, penelitian ini juga mendukung upaya penerapan *good governance* melalui pemanfaatan teknologi informasi dan pengembangan kapasitas SDM, sekaligus membantu memenuhi tuntutan regulasi yang relevan. Dengan demikian, tata kelola keuangan daerah semakin efektif dan dapat dipercaya oleh masyarakat, yang akan mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.

2. TELAAH LITERATUR

Teori Pemangku Kepentingan *Stakeholder Theory*

Teori Pemangku Kepentingan *Stakeholder Theory* adalah kerangka konseptual yang menekankan pentingnya mempertimbangkan dan mengelola hubungan antara organisasi dan berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap aktivitas dan keputusan yang diambil. Diperkenalkan oleh R. Edward Freeman pada tahun 1984, teori ini menyatakan *Stakeholder theory* menekankan pengelolaan *shareholders* (pemegang saham) dan *stakeholders* (pemangku kepentingan) untuk keberlanjutan organisasi (Ulya dan Parasetya, 2024). Pendekatan ini mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.

Secara keseluruhan, teori ini menekankan bahwa keberhasilan organisasi, baik sektor swasta maupun publik, sangat bergantung pada bagaimana organisasi mampu mengelola hubungan dan komunikasi dengan semua pemangku kepentingan (Juli, 2024).

Dengan memenuhi kebutuhan dan melibatkan mereka dalam tata kelola, organisasi dapat meminimalkan risiko kerugian sekaligus meningkatkan nilai dan kepercayaan yang diperoleh dari tindakan yang dilakukan. Pendekatan ini mendorong terciptanya transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam pengelolaan organisasi atau pemerintahan.

Tujuan utama teori pemangku kepentingan adalah membantu pemerintah meminimalkan potensi kerugian bagi pemangku kepentingan. Dalam hal ini masyarakat sekaligus juga meningkatkan perolehan nilai sebagai konsekuensi dari tindakan yang dilakukan (Harjito et al., 2020)

Teori Good Governance

Good governance menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, efektivitas, dan supremasi hukum dalam tata kelola pemerintahan (UNDP, 1997). Prinsip ini terwujud melalui perencanaan anggaran, pelaporan keuangan, dan pengawasan yang terbuka, sehingga meningkatkan kualitas laporan dan kepercayaan (Viyurintina et al., 2024; Sihotang, 2023).

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan memperkuat legitimasi kebijakan publik. Indikator utama mencakup keterbukaan informasi, kepastian hukum, dan pelayanan responsif (Yasin et al., 2024). Dalam konteks pelaporan keuangan daerah, *good governance* memastikan akuntabilitas melalui akses publik terhadap data anggaran dan laporan *real time* via aplikasi SIPD.

Relevansi dengan penelitian ini terletak pada hubungan transparansi dan kesiapan SDM terhadap mutu pelaporan di Kota Palopo. Pendekatan ini sejalan dengan reformasi birokrasi Indonesia, menjadikan transparansi fondasi pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan (Aritmal et al., 2025).

Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

Aplikasi sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) merupakan alat penting dalam pengelolaan administrasi dan keuangan daerah. SIPD dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keuangan. Implementasi SIPD dapat mempercepat proses pelaporan keuangan dan meningkatkan akurasi data yang disajikan. Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, pemerintah daerah dapat memantau dan mengelola anggaran secara lebih transparan dan akuntabel.

Selain itu, SIPD juga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran (Nasution et al., 2021). Dengan demikian, aplikasi SIPD tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Namun, tantangan dalam implementasi SIPD tetap ada, terutama terkait dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang mengelola sistem tersebut. Tanpa adanya pelatihan dan pemahaman yang memadai, penggunaan SIPD dapat menjadi kurang efektif (Fitrohtil et al., 2024). SIPD meningkatkan efisiensi pelaporan keuangan daerah melalui integrasi data (Nasution et al., 2021). Namun, kesiapan SDM menjadi faktor kunci keberhasilannya.

Transparansi

Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam menciptakan akuntabilitas publik. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi mengenai penggunaan anggaran dan pelaporan keuangan, sehingga dapat melakukan pengawasan terhadap pemerintah (Shafitri et al., 2025). Transparansi dalam pelaporan keuangan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dengan demikian adanya transparansi, diharapkan

masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Namun, meskipun transparansi memiliki banyak manfaat, tantangan dalam implementasinya tetap ada. Beberapa pemerintah daerah masih menghadapi kendala dalam menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu. Menurut (Kristian *et al.*, 2024) kurangnya infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai menjadi hambatan dalam mencapai transparansi yang diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kapasitas dan infrastruktur dalam mendukung transparansi di tingkat pemerintah daerah.

Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kesiapan sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi sistem informasi dan transparansi dalam pelaporan keuangan. SDM yang terampil dan berpengetahuan dapat mengoperasikan sistem informasi dengan baik, sehingga meningkatkan kualitas pelaporan keuangan (Hadiati *et al.*, 2024). SDM yang memahami peraturan akan lebih mampu menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pengetahuan tentang regulasi keuangan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan (Rompas *et al.*, 2022). Dengan demikian, investasi dalam pendidikan dan pelatihan SDM harus menjadi prioritas bagi pemerintah daerah.

Namun, tantangan dalam meningkatkan kesiapan SDM tidak dapat diabaikan. Banyak pegawai pemerintah daerah yang masih kurang mendapatkan pelatihan yang memadai. kurangnya perhatian terhadap pengembangan SDM dapat menghambat kemajuan dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang mendukung pengembangan SDM agar dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tuntutan transparansi dalam pelaporan keuangan (Islam *et al.*, 2023)

Pelaporan Keuangan di Kota Palopo

Pelaporan keuangan pemerintah daerah merupakan elemen penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Di Kota Palopo, pelaporan keuangan telah bertransformasi dari sistem berbasis kas menuju sistem berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Ginanjari, 2021). Sistem akrual memungkinkan pencatatan transaksi saat hak dan kewajiban muncul, sehingga kualitas pelaporan keuangan yang dihasilkan lebih akurat dan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Hal ini mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan daerah

Implementasi pelaporan keuangan berbasis akrual di Kota Palopo menunjukkan hasil yang memuaskan (Handayani *et al.*, 2025). Namun, masih terdapat kendala utama, seperti integrasi sistem aplikasi keuangan yang belum optimal serta keterbatasan sumber daya manusia yang ahli di bidang akuntansi akrual. Sistem seperti SAIBA dan SIMAK BMN yang belum terintegrasi menimbulkan hambatan dalam pencatatan aset dan kewajiban, sehingga perlu adanya peningkatan koordinasi dan pelatihan agar pelaporan keuangan dapat lebih efektif dan akurat (Yanti, 2021).

1. Indikator Variabel

Tabel 1. Variabel Indikator

No	Variabel (X),(Y)	Indikator
1.	Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (X1)	1. Fungsi Sistem 2. Kemudahan Penggunaan 3. Kecepatan Akses Data 4. Integrasi Data
2.	Transparansi (X2)	1. Aksesibilitas Informasi 2. Keterbukaan Laporan Keuangan 3. Partisipasi Masyarakat 4. Kualitas Informasi
3.	Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) (X3)	1. Pelatihan dan Pengembangan 2. Pengetahuan tentang Regulasi 3. Kemampuan Teknologi Informasi 4. Motivasi dan Komitmen
4.	Pelaporan Keuangan (Y)	1. Kualitas Laporan Keuangan 2. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi 3. Transparansi Laporan 4. Tindak Lanjut Temuan Audit

2. Pengembangan Hipotesis

Hubungan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palopo

Aplikasi sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data keuangan. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, proses pengumpulan dan pelaporan data keuangan menjadi lebih cepat dan akurat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan publik dapat memperbaiki transparansi dan akuntabilitas (Triwahyuni, 2024). Oleh karena itu, hipotesis ini mengharapkan bahwa semakin baik penerapan SIPD, semakin tinggi kualitas pelaporan keuangan yang dihasilkan.

Meskipun secara teoritis SIPD diharapkan berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis tersebut tidak terbukti secara empiris pada konteks Pemerintah Kota Palopo.

H1 : SIPD Berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan keuangan Pemerintah kota Palopo

Hubungan Transparansi Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palopo

Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi secara terbuka dan akurat mengenai penggunaan anggaran serta pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dengan keterbukaan informasi yang baik, masyarakat dapat menjalankan fungsi pengawasan secara lebih efektif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Penelitian terkini menunjukkan bahwa transparansi keuangan daerah secara signifikan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah, mendorong partisipasi masyarakat, serta memperkuat

kepercayaan publik sambil mengurangi potensi penyimpangan dan korupsi (Kristian *et al.*, 2023). Oleh karena itu, hipotesis ini berasumsi bahwa semakin tinggi tingkat transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, semakin baik kualitas akuntabilitas dalam pelaporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah.

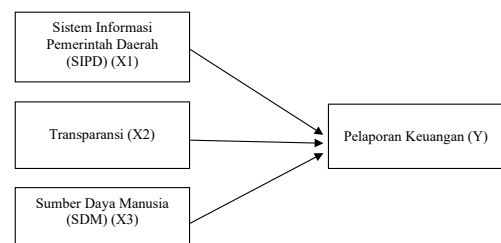
H2 : Transparansi Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Palopo.

Hubungan SDM Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palopo

Kesiapan SDM mencakup kemampuan dan pengetahuan pegawai dalam mengoperasikan sistem informasi dan memahami regulasi yang berlaku. SDM yang terampil dan berpengetahuan akan lebih mampu menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Penelitian menunjukkan bahwa pelatihan dan pengembangan SDM yang memadai dapat meningkatkan efektivitas sistem informasi yang diterapkan (Nazhira dan Candradewini, 2025). Oleh karena itu, hipotesis ini mengharapkan bahwa semakin siap SDM dalam mengelola sistem informasi, semakin efektif pelaporan keuangan yang dihasilkan.

H3 : Kesiapan SDM Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Palopo.

Model Penelitian



Gambar 1. Model Penelitian

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo. Populasi penelitian adalah seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di BPKAD Kota Palopo sebanyak 52 orang. Mengingat jumlah populasi relatif kecil dan seluruh pegawai terlibat langsung dalam pengelolaan serta pelaporan keuangan daerah, maka teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah total sampling.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner berskala Likert yang disusun berdasarkan indikator variabel Sistem Informasi Pemerintah Daerah (X2), Transparansi (X1), Kesiapan Sumber Daya Manusia (X3), dan Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y), yang dikembangkan dari penelitian terdahulu dan disesuaikan dengan konteks penerapan SIPD. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda setelah terlebih dahulu dilakukan uji validitas, reliabilitas, serta uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Hasil Uji Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana instrument penelitian menggunakan mampu mengukur variabel yang ditetapkan. Dalam analisis menggunakan SPSS, uji validitas dilakukan dengan melihat nilai *Corrected Item-Total Correlation*, yaitu korelasi antara skor masing-masing variabel. Suatu item dinyatakan valid apabila nilai r hitung $> r$ tabel, pada taraf signifikansi (0,05).

Tabel 2. Uji Validitas

Variabel	Indikator	R Hitung	R Tabel	Sig.	Keterangan
Sistem Informasi Pemerintah Daerah	SIPD1	0.404	0.270	0.003	Valid
	SIPD 2	0.441	0.270	0.001	Valid
	SIPD 3	0.440	0.270	0.001	Valid
	SIPD 4	0.602	0.270	0.000	Valid
	SIPD 5	0.628	0.270	0.000	Valid
	SIPD 6	0.496	0.270	0.000	Valid
	SIPD 7	0.508	0.270	0.000	Valid
Transparansi	TP 1	0.367	0.270	0.007	Valid
	TP 2	0.648	0.270	0.000	Valid
	TP 3	0.614	0.270	0.000	Valid
	TP 4	0.527	0.270	0.000	Valid
	TP 5	0.528	0.270	0.000	Valid
	TP 6	0.595	0.270	0.000	Valid
	TP 7	0.645	0.270	0.000	Valid
Sumber Daya Manusia	SDM 1	0.326	0.270	0.020	Valid
	SDM 2	0.395	0.270	0.004	Valid
	SDM 3	0.584	0.270	0.000	Valid
	SDM 4	0.553	0.270	0.000	Valid
	SDM 5	0.451	0.270	0.001	Valid
	SDM 6	0.535	0.270	0.000	Valid
	SDM 7	0.580	0.270	0.000	Valid
Pelaporan Keuangan	PK1	0.653	0.270	0.000	Valid
	PK2	0.482	0.270	0.000	Valid
	PK3	0.425	0.270	0.002	Valid
	PK4	0.565	0.270	0.000	Valid
	PK5	0.588	0.270	0.000	Valid
	PK6	0.681	0.270	0.000	Valid
	PK7	0.577	0.270	0.000	Valid
	PK8	0.525	0.270	0.000	Valid

Sumber Data diolah SPSS 2025

Berdasarkan tabel diatas, Semua indikator dinyatakan valid karena nilai r hitung $> r$ table dan Tingkat signifikansi (<0.05), hal ini menunjukkan bahwa setiap pertanyaan dalam kuesioner mampu mengukur aspek yang memang seharusnya diukur sesuai dengan variabel penelitian. Sehingga korelasi antara variabel independen dan dependen dianggap valid.

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana instrument penelitian memberikan hasil yang konsisten ketika digunakan untuk mengukur variabel yang sama. Dalam analisis menggunakan SPSS, uji reliabilitas biasanya dilihat melalui nilai *Cronbach's alpha*, dimana suatu instrument dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai lebih besar dari (0,60).

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Crombach's Alpha	Keterangan
SIPD	0.709	Reliabel
Transparansi	0.709	Reliabel
Kesiapan SDM	0.709	Reliabel
Pelaporan Keuangan 0.709 Reliabel		

Sumber: Data diolah SPSS 2025

Untuk hasil uji reliabilitas variabel SIPD, Transparansi, Kesiapan SDM, dan Pelaporan Keuangan, dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan reliabel karena nilai keseluruhan variabel *cronbach's alpha* adalah (> 0.60).

4.1.2 Uji Hipotesis

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	.172	4.221		.041
	SIPD	.149	.188	.103	.895
	TR	.889	.113	.585	5.903
	SDM	.350	.180	.258	2.186

a. Dependent Variable: PK

1. Tabel Uji T

Berdasarkan tabel 3 di atas pengaruh dari masing-masing variabel independent terhadap variabel dependen dapat dituliskan sebagai berikut:

- Sesuai dengan Hasil uji parsial (uji t) di atas menunjukkan bahwa nilai signifikan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) lebih besar dari 0.05 yaitu ($0.375 > 0.05$), dan nilai nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel ($0.895 > 2.002$) menunjukkan SIPD tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pelaporan keuangan.
- Sesuai dengan Hasil uji parsial (uji t) di atas menunjukkan bahwa nilai signifikan Transparansi lebih kecil dari 0.05 yaitu ($0.000 < 0.05$), dan nilai nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel ($5.903 > 2.002$) menunjukkan Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pelaporan keuangan.
- Sesuai dengan Hasil uji parsial (uji t) di atas menunjukkan bahwa nilai signifikan Kesiapan SDM lebih kecil dari 0.05 yaitu ($0.034 < 0.05$), dan nilai nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel ($2.186 > 2.002$) menunjukkan Kesiapan SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pelaporan keuangan.

2. Tabel Uji F

Tabel 5. Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F
1	Regression	316.899	3	105.633	25.978
	Residual	195.178	48	4.066	
	Total	512.077	51		

a. Dependent Variable: PK

b. Predictors: (Constant), SDM, TR, SIPD

Sesuai dengan tabel 5 diatas hasil uji f (simultan) menunjukkan bahwa nilai signifikansi Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Transparansi, dan Kesiapan SDM lebih kecil dari 0,05 yaitu ($0.000 < 0.05$), dan nilai f hitung lebih besar dari nilai f table ($25.978 > 3.191$) menunjukkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Transparansi, dan Kesiapan SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pelaporan Keuangan.

3. Tabel Uji R

Tabel 6. Hasil Uji R

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.787 ^a	.619	.595	2.016

a. Predictors: (Constant), SDM, TR, SIPD

Dari output diatas didapatkan nilai dari Adjusted R Square sebesar (0.595) yang artinya pengaruh Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Transparansi, Kesiapan SDM, terhadap Laporan keuangan sebesar 59% dan sisanya 41% dijelaskan oleh faktor lain diluar model dan berada pada kategori moderat karena lebih besar dari (0.33).

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Terhadap Pelaporan Keuangan Kota palopo

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan Pemerintah Kota Palopo. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan sistem informasi keuangan secara formal belum secara

otomatis mampu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan apabila tidak diikuti dengan kesiapan organisasi, kompetensi pengguna, serta dukungan infrastruktur teknologi yang memadai.

Dalam perspektif Stakeholder Theory, sistem informasi keuangan publik seharusnya berfungsi sebagai sarana penyediaan informasi yang relevan, andal, dan tepat waktu bagi para pemangku kepentingan, seperti masyarakat, DPRD, dan lembaga pengawas. Namun, ketika SIPD belum dioperasikan secara optimal oleh aparat yang kompeten, maka informasi yang dihasilkan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan dan ekspektasi para pemangku kepentingan tersebut (Arif & Firmansyah, 2024).

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Fitriasari, 2024) yang menyatakan bahwa penerapan SIPD belum tentu meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah apabila masih terdapat kendala teknis, rendahnya pemahaman pengguna sistem, serta terbatasnya integrasi antar-modul sistem. Hal ini menunjukkan bahwa SIPD dalam praktiknya cenderung berfungsi sebagai alat administratif, bukan sebagai instrumen strategis peningkatan akuntabilitas keuangan daerah.

Ditinjau dari prinsip good governance, pemanfaatan sistem informasi pemerintahan seharusnya mendukung terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik. Namun, hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa penerapan teknologi tanpa diiringi penguatan tata kelola dan kapasitas sumber daya manusia belum mampu menghasilkan perbaikan kualitas pelaporan keuangan secara signifikan (Putri & Purnamawati, 2025). Dengan demikian, konteks empiris di Kota Palopo menunjukkan bahwa optimalisasi SIPD memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya berfokus pada aspek sistem, tetapi juga pada aspek manusia dan manajerial.

2. Pengaruh Transparansi terhadap Pelaporan Keuangan di kota palopo

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan Pemerintah Kota Palopo. Temuan ini menegaskan bahwa keterbukaan informasi keuangan merupakan faktor kunci dalam mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel dan dapat dipercaya oleh publik.

Dalam kerangka Stakeholder Theory, transparansi memungkinkan pemangku kepentingan untuk memperoleh informasi keuangan yang jelas dan memadai, sehingga mereka dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Keterbukaan informasi mendorong pemerintah daerah untuk menyusun laporan keuangan secara lebih cermat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku karena adanya tekanan pengawasan dari masyarakat dan lembaga pengawas (Kristian *et al.*, 2023).

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Rafael *et al.*, 2024) yang menyatakan bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan melalui penguatan mekanisme akuntabilitas publik. Selain itu, transparansi juga berperan dalam meminimalkan potensi penyimpangan dan praktik fraud di sektor publik.

Ditinjau dari perspektif good governance, transparansi merupakan salah satu prinsip utama yang harus diwujudkan dalam pengelolaan keuangan publik. Penelitian (Shafitri *et al.*, 2025) menegaskan bahwa transparansi pelaporan keuangan yang didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Dengan demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Palopo, semakin baik

pula kualitas pelaporan keuangan yang dihasilkan.

3. Pengaruh Kesiapan SDM terhadap Pelaporan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan Pemerintah Kota Palopo. Temuan ini mengindikasikan bahwa kompetensi aparatur memiliki peran strategis dalam memastikan proses pelaporan keuangan berjalan secara akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam konteks Stakeholder Theory, aparatur yang kompeten berperan sebagai penghubung utama antara sistem pengelolaan keuangan dan kebutuhan informasi para pemangku kepentingan. Aparatur yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai akan lebih mampu mengoperasikan SIPD, memahami regulasi keuangan, serta menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Naida, 2024).

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Hadiati *et al.*, 2024) yang menyatakan bahwa kesiapan dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap efektivitas sistem informasi dan kualitas pelaporan keuangan sektor publik. Selain itu, (Nazhira dan Candradewini, 2025) menegaskan bahwa pelatihan dan pengembangan aparatur secara berkelanjutan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kinerja sistem informasi pemerintahan.

Dalam perspektif good governance, kesiapan sumber daya manusia menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Tanpa aparatur yang kompeten, penerapan sistem dan kebijakan keuangan tidak akan berjalan secara efektif. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas aparatur sebagai fondasi utama peningkatan kualitas pelaporan keuangan di Pemerintah Kota Palopo.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan Pemerintah Kota Palopo, yang mengindikasikan bahwa pemanfaatan sistem informasi belum optimal tanpa dukungan pengelolaan dan kompetensi aparatur yang memadai. Sebaliknya, transparansi dan kesiapan sumber daya manusia terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan, sehingga menegaskan bahwa keterbukaan informasi dan kompetensi aparatur merupakan faktor kunci dalam mewujudkan pelaporan keuangan yang akuntabel. Secara simultan, SIPD, transparansi, dan kesiapan sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan, yang menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelaporan keuangan daerah memerlukan sinergi antara pemanfaatan teknologi informasi, penguatan transparansi, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian hanya dilakukan pada satu instansi yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo dengan jumlah responden sebanyak 52 orang sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada seluruh pemerintah daerah. Kedua, penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen yaitu penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), transparansi, dan kesiapan sumber daya manusia sehingga masih terdapat faktor lain yang kemungkinan juga memengaruhi kualitas pelaporan keuangan namun belum diteliti dalam penelitian ini. Ketiga, pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner sehingga

jawaban responden sangat bergantung pada persepsi dan tingkat kejujuran responden dalam memberikan jawaban.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disarankan kepada Pemerintah Kota Palopo khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) melalui peningkatan kualitas infrastruktur teknologi serta pelatihan penggunaan sistem bagi aparatur agar penerapannya dapat mendukung peningkatan kualitas pelaporan keuangan. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan terus meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan dengan menyediakan akses informasi yang lebih terbuka kepada masyarakat guna memperkuat akuntabilitas publik. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia juga perlu menjadi perhatian melalui program pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan agar aparatur mampu menyusun laporan keuangan secara lebih akurat dan sesuai dengan standar yang berlaku. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang dapat memengaruhi kualitas pelaporan keuangan daerah sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aritmal, S. N. K., Pratiwi, I., & Riyanti. (2025). *Analisis Pengaruh Good Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan*. 18(1), 244–255.
- Fitrohtil, Y., Firdaus, H., & Cholik, M. A. (2024). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(1), 68–78.
- Hamid, A., Hermawati, H., & Aulia, P. (2025). Peran Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Sektor Publik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik* 2(3), 4627–4633.
- Handayani, S. A., & Supriatna, I. (2025). Pengaruh Penerapan SIPD, Kompetensi SDM Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 5(5), 141–148.
- Harjito, Y., Surya, G. P., & Yulianto, N. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Dan Kota. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 5(1), 19–28.
- Islam, M., & Rahman, A. (2023). Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Menghadapi Digitalisasi. *Jurnal Administrasi Negara*, 3(2), 88-97.
- Juli, N. (2024). Penerapan Teori Stakeholder Pada Praktik Corporate Social Responsibility (Csr). *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 1(4), 461–475.
- Kristian, I., Nuradhawati, R., & Ristala, H. (2023). Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pencegahan Fraud Sektor Publik. *Jurnal Governance*, 2(1), 15-26.
- Naida, N. (2024). Optimalisasi SIPD Dan SPIP Dalam Meningkatkan Kualitas
- GINANJAR, M. (2021). Implementasi Kebijakan Sistem Pelaporan Berbasis Akrua Di DPMPTSP Kota Palopo. *Jurnal Administrasi Publik*, 11 (1), 68-78.
- HADIATI, E., ISLAM, U., RADEN, N., LAMPUNG, I., & LAMPUNG, K. B. (2024). *Peran Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Dalam Perumusan Dan Implementasi Strategi Sdm Yang Efektif*. 2(12).

- Laporan Keuangan: Pentingnya Kompetensi SDM. *Solusi*, 22(4), 465–479.
<https://doi.org/10.26623/Slsi.V22i4.10554>
- Nasution, M. I., & Ningsih, N. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 109.
<https://doi.org/10.29103/Jak.V9i2.4577>
- Nazhira, A. Z., & Candradewini, C. (2025). Optimalisasi sistem informasi manajemen kepegawaian: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Cirebon. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 17(1), 60-71.
- Rafael, K., Gamaliel, H., & Korompis, C. W. M., (2024). Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Website Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi*, 19(1), 52–63.
- Ritonga, P. (2024). Transparansi Dan Akuntabilitas: Peran Audit Dalam Meningkatkan Kepercayaan Stakeholder. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 13(2), 323-336.
- Rompas, F. V., Kindangen, W. D., & Rondonuwu, S. (2022). Analisis Kualitas Laporan Keuangan Pada BPKAD Kota Manado. *Jurnal Akuntansi Daerah*, 6(1), 461–468.
- Shafitri, A., Ratman, M. N., Jufani, A. P., Aliza, S. W., & Pangestoeti, W. (2025). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas APBN Dalam Pengelolaan Keuangan Negara. *Jurnal Keuangan Negara*, 2(1), 1-12.
- Teken, I. K. A. (2024). terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Denpasar. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 4(2), 111-123.
- Triwahyuni, F. (2024). Pemanfaatan Teknologi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Nusantara Hasana Journal*. 4(5), 58–71.
- Ulya, S. N., & Parasetya, M. T. (2024). Pengaruh Aspek Investasi Terhadap Pelaporan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 13(1), 1–13.
- Viyurintina, E., & Sisdianto, E. (2024). Good Governance Dan Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 2(4), 210-220.
- Yanti, H. B. (2021). Kualitas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 21(2), 227–244.
- Yasin, A. S. Y., Anwar, A., Sagena, U. W., & Masjaya, M. (2024). Analisis Kebijakan Publik Dan Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Good Governance. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 17(2), 410-418.